

2025 LAPORAN TRIWULAN II



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



BADAN PANGAN NASIONAL

Jakarta, Juli 2025

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Triwulan II Tahun 2025 Badan Pangan Nasional. Laporan ini sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Triwulan ini disusun dalam rangka melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Badan Pangan Nasional. Selain itu, laporan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk terselenggaranya good governance dan clean government.

Laporan Triwulan II Badan Pangan Nasional ini berisikan Capaian Atas Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantun dalam rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Pencapaian pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami sadari, bahwa laporan ini belumah sempurna, untuk itu kami harapkan kritik dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan laporan kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 7 Juli 2025
Plt. Sekretaris Utama,



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	3
1.5. Maksud dan Tujuan	4
1.6. Metodologi Pengukuran	4
1.7. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	5
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional	5
2.1.2 Tujuan Badan Pangan Nasional	6
2.1.3 Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional	6
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025	8
2.3. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Pengelolaan Kinerja	11
3.2. Realisasi Indikator Kinerja	12
3.2.1 Inflasi Harga Bergejolak	14
3.2.2 Penanganan Kerawanan Pangan Indikator Penanganan Kerawanan Pangan (Prevalensi Penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ Food Insecurity Experience Scale (FIES))	17
3.2.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	18
3.2.4 Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan, (Indeks Keamanan Pangan Segar)	24
3.2.5 Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	29
3.3. Realisasi Anggaran	30



BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi

33

33

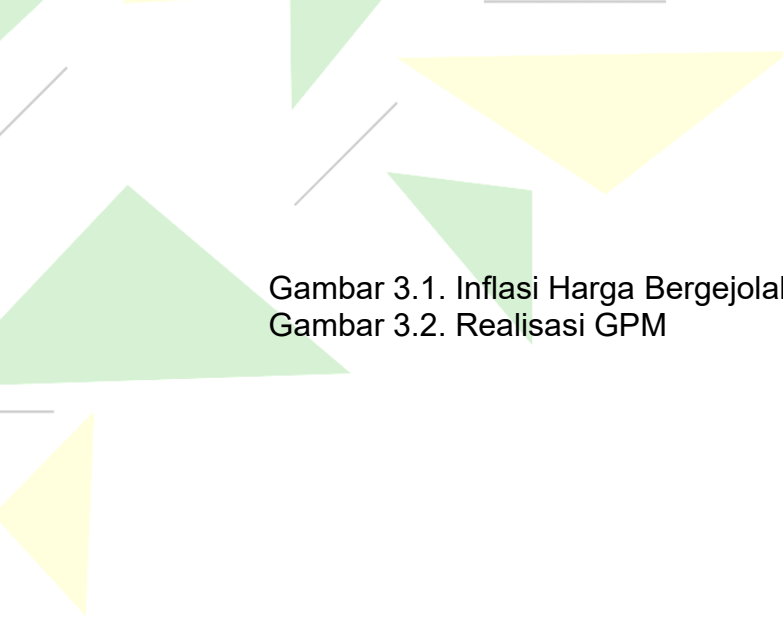
33

LAMPIRAN

35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Strategis, dan Kinerja Utama	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025	9
Tabel 3.1 Tujuan Indikator	12
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Per 30 Juni Tahun 2025	12
Tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Per Triwulan II Tahun 2025	13
Tabel 3.4 Perhitungan Presentasi Penerbitan Registrasi	25
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Per 30 Juni Tahun 2025	30
Tabel 3.6 Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional sampai dengan Juni 2025	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Inflasi Harga Bergejolak
Gambar 3.2. Realisasi GPM

15
16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional (DIPA Awal)	35
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional	37
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional	39
Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional thn 2025	42
Lampiran 5. Rencana Aksi Penarikan Dana Badan Pangan Nasional Tahun 2025	49
Lampiran 6. Lembar III Dipa Juni 2025	59

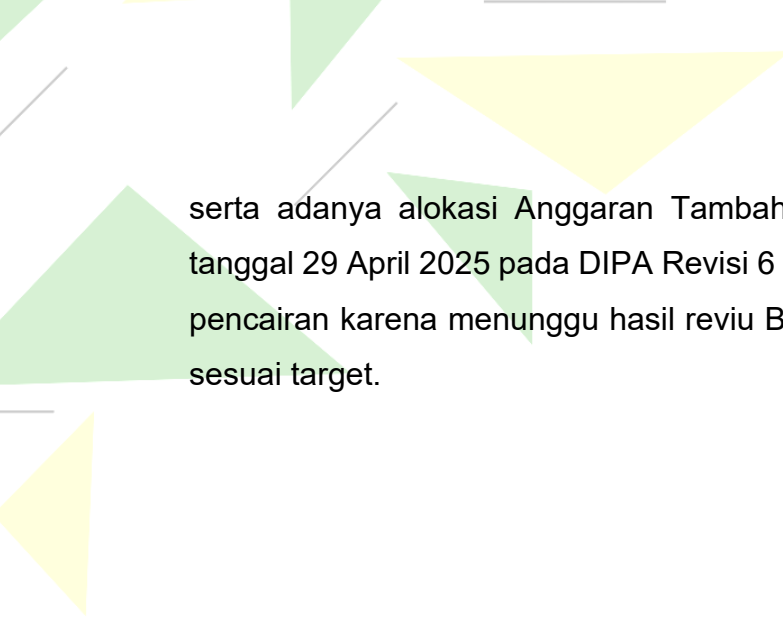
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Triwulan II Tahun 2025 akan menyajikan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS) untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, Badan Pangan Nasional akan bertanggungjawabkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Sasaran Strategis tersebut adalah: 1) Mewujudkan ketersediaan dan stabilitasi pangan; 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan; 3) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan; 4) Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar; 5) Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik per-triwulan.

Alokasi anggaran berdasarkan DIPA Revisi ke-7 Tahun 2025 sebesar Rp.2.857.406.855.000,- yang terdiri dari Satker Pusat Rp.2.801.268.025.000,- dan Satker Dekonsentrasi sebesar Rp.56.138.830.000,-.

Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan II Tahun 2025, pada prinsipnya merupakan kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 disajikan untuk menggambarkan capaian proses pengukurannya mengingat IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025 pencapaiannya sebagian besar diukur diakhir tahun. Pada pengukuran periode triwulan II capaian yang dapat diukur yaitu IKU: Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dengan menggunakan metode minimize target pada triwulan maksimal target 5%. Capaian Inflasi Harga Bergejolak periode triwulan II tahun 2025 sebesar 0,57% lebih tinggi dibandingkan periode Triwulan I sebesar 0,37% dari target RPJMN 2025-2029 sebesar 3-5%, sehingga capaian Indikator Harga Bergejolak sebesar 100%.

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan 30 Juni tahun 2025 atau triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp808.396.205.185,- atau (29,90%) dari pagu total Rp2.857.406.855.000,-. Terdiri dari anggaran Pusat Rp2.801.268.025.000,- dan Dekonsentrasi Rp56.138.830.000,-. Dari pagu tersebut dengan adanya kebijakan efisiensi sebesar Rp154.184.443.000,- atau (5,40%). Rendahnya realisasi anggaran pada periode Triwulan II ini disebabkan dinamika perencanaan program dan anggaran dengan beberapa kali revisi DIPA dalam rangka penyesuaian anggaran dari kebijakan efisiensi,



serta adanya alokasi Anggaran Tambahan (ABT) untuk bantuan pangan baru terbit tanggal 29 April 2025 pada DIPA Revisi 6 sebesar Rp. 2 trilyun yang belum dapat proses pencairan karena menunggu hasil rewiu BPKP, sehingga kegiatan belum dapat berjalan sesuai target.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dan dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek sesuai Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025. PK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 harus dipertanggung jawabkan secara berkala melalui laporan Triwulan dan Tahunan. Penyusunan laporan triwulan ini dilatarbelakangi untuk mengetahui progress serapan anggaran, progress capaian indikator kinerja, dan pencapaian Perjanjian Kinerja.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbadan Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.
5. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

1.4. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari:

1. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
4. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.
5. Inspektorat; mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Pangan Nasional.
6. Pusat Data dan Informasi Pangan; mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Adapun tujuan penyusunan laporan triwulan II adalah mengevaluasi capaian kinerja Badan Pangan Nasional sampai periode triwulan II Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional.

1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional periode Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan II Tahun 2025 dengan target keuangan sesuai lembar ke-3 DIPA sampai dengan posisi triwulan II Badan Pangan Nasional sebesar 27,84%.

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Badan Pangan Nasional, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional, Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan II Tahun 2025.

Bab IV PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi di Badan Pangan Nasional, dalam proses penetapan Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar bagi unit kerja eselon I dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance score card* (BSC) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: ***“Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”***

Yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.

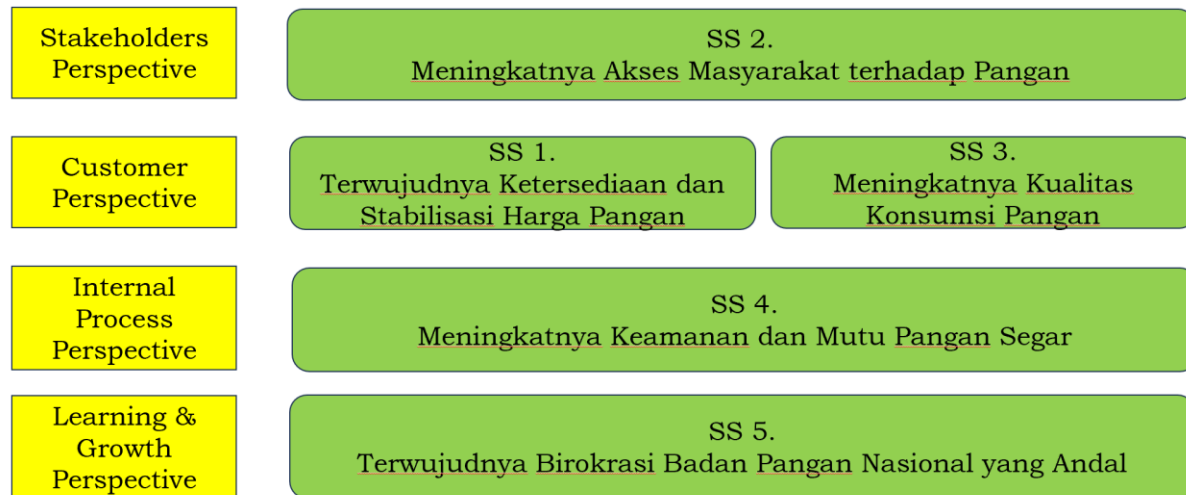
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sisa pangan.
6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
7. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
8. Menyelenggarakan bantuan pangan.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

2.1.2 Tujuan Badan Pangan Nasional

Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman yang diindikasikan dengan indikator tujuan Badan Pangan Nasional yaitu: Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik (*self-sufficiency ratio*/SSR). Indikator ini mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan sejauh mana negara dapat menyediakan pangan untuk memenuhi permintaan domestiknya. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas beras, jagung dan gula. Angka SSR ditargetkan > 90% dengan harapan Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan, dengan produksi pangan domestik mendekati, atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

2.1.3 Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan target kinerja yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan pada periode sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

- a. SS1. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Harga Bergejolak.
- b. SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES).
- c. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH konsumsi.
- d. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar.
- e. SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Visi	Misi	Tujuan	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan	Memperkuat tata kelola penyediaa n pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman	Indikator Tujuan Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik)	1. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan	IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak.
	2. Memperkuat logistik dan distribusi pangan			2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan	IKSS2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>
	3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan				
	4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan				
	5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan				
	6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	IKSS 3 Skor PPH Konsumsi
	7. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar			4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	IKSS 4 Indeks Keamanan Pangan Segar
	8. Menyelenggarakan bantuan pangan			5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	IKSS 5 Nilai RB
	9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal				

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

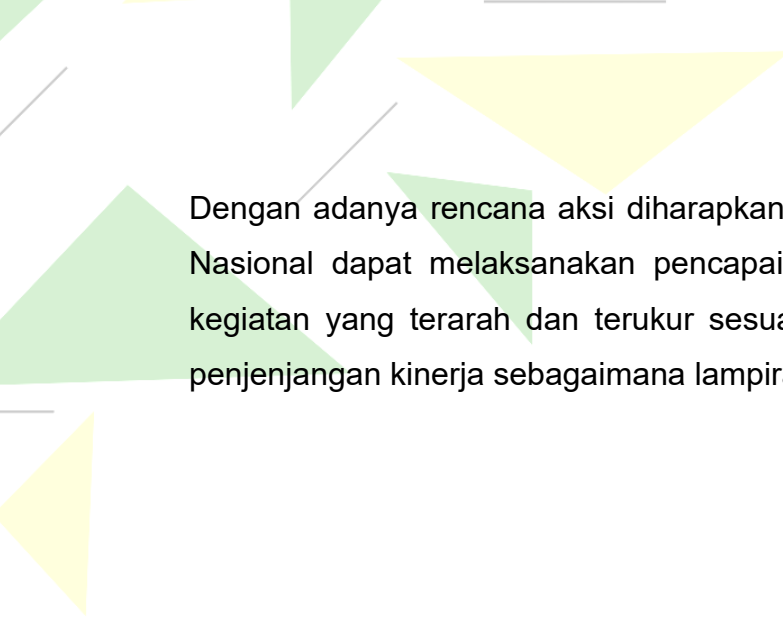
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	3,75
3	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	94
4	Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	Indeks	61
5	Nilai RB	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai	81

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional yaitu pada point 1 (satu) terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan semula inflasi harga pangan bergejolak menjadi inflasi harga bergejolak, dan point 2 (dua) Indeks Keamanan Pangan Segar merupakan PK baru yang dicascading langsung dari RPJMN 2025-2029..

2.3. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.



Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dengan penjenjangan kinerja sebagaimana lampiran 3.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sbb:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Berhasil : > 80% - 90%
3. Cukup Berhasil : > 60% - 80%
4. Kurang Berhasil : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Berhasil : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk *maximize*, *minimize* dan *stabilize* sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya.

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	%	NA	86,00	88,82	87,64	88,99	90,29	91,03

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity</i>	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36

		<i>Experience Scale</i> (FIES)								
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	Indeks keamanan pangan segar	%	na	60	61	62	63	64	65
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	na	66,89	82	84	86	88	90

Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah (2024)

Capaian kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis (SS) periode Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Target dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Per Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Persentase
				Tahunan	Realisasi	
1	Mewujudkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5	0,57	100
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	3,75	Tahunan	-
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	94	Tahunan	-
4	Meningkatnya penjaminan	Indeks Keamanan	Indeks	61	Tahunan	-

	keamanan pangan	Pangan Segar				
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	81	Tahunan	-

Dari tabel di atas gambaran Sasaran Strategis, target IKU dan capaian IKU Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

3.2.1. SS. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan

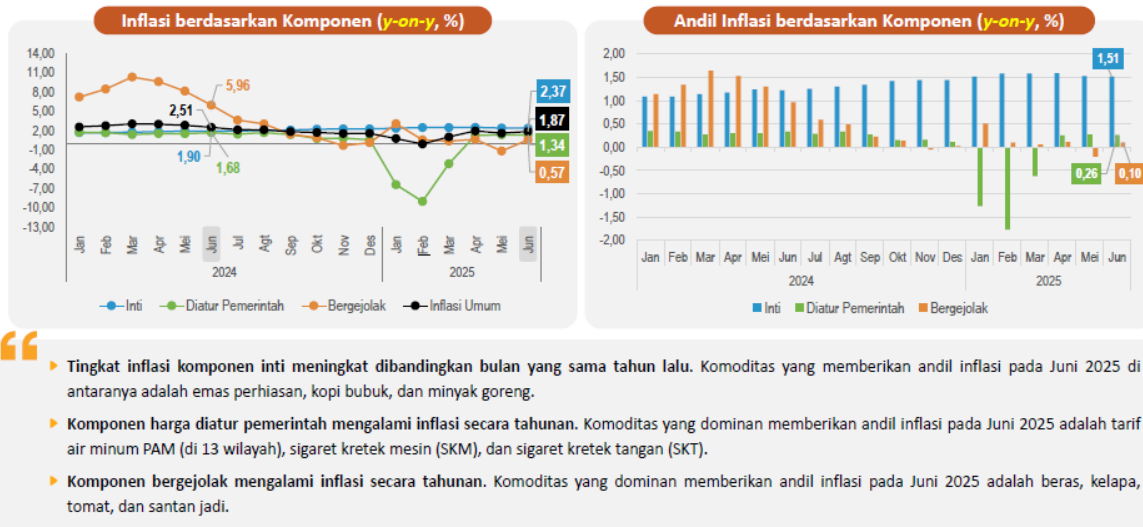
Indikator: Inflasi Harga Bergejolak

Pada Juni 2025 terjadi inflasi *year-on-year* (*y-on-y*) sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,27. Inflasi provinsi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 3,00 persen dengan IHK sebesar 111,03 dan terendah terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 108,41. Sedangkan deflasi provinsi *y-on-y* terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,67 persen dengan IHK sebesar 107,22 dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,10 persen dengan IHK sebesar 106,61. Sementara inflasi kabupaten/kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 4,00 persen dengan IHK sebesar 112,25 dan terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,60. Sedangkan deflasi kabupaten/kota *y-on-y* terdalam terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 1,34 persen dengan IHK sebesar 105,61 dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 105,92.

- Tingkat inflasi *month-to-month* (*m-to-m*) Juni 2025 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi *year to date* (*y-to-d*) Juni 2025 sebesar 1,38 persen.
- Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti Juni 2025 sebesar 2,37 persen; inflasi *m-to-m* sebesar 0,07 persen; dan inflasi *y-to-d* sebesar 1,24 persen.

INFLASI JUNI 2025 MENURUT KOMPONEN (y-on-y)

Seluruh komponen mengalami inflasi



Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (1 Juli 2025)

Activate Windows

Gambar 3.1. Inflasi Harga Bergejolak, sumber BPS.

Kontribusi Badan Pangan Nasional dalam menjaga inflasi harga bergejolak melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas yang menanganai pangan diseluruh Indoensia baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan yang dilakukan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh Indonesia untuk menjaga inflasi harga pangan bergejolak, serta bekerjasama dengan dengan Bulog, Id-food dan mitra lainnya yang mendukung pelaksanaan GPM. Capaian inflasi harga bergejolak pada Triwulan II bulan Juni tahun 2025 sebesar **0,57%** dari target 3-5 atau mencapai 100 %



Gambar 3.2. Realisasi Pelaksanaan GPM Nasional sampai dengan Januari-Juni 2025.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM bulan Januari-Juni tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 3.961 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 67 kali, provinsi sebanyak 884 kali di 34 provinsi dan 3.010 kali di 256 kabupaten/Kota,

baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

Perhitungan capaian inflasi harga bergejolak

A. Jika di bawah 3%

$$\text{Capaian Inflasi Harga Bergejolak } (Vi) = \left(1 - \frac{3 - Vi}{3}\right) \times 100\%$$

B. Jika di $3\% \leq Vi \leq 5\%$ maka capaian 100%

C. Jika di atas 5%

$$\text{Capaian Inflasi Harga Bergejolak } (Vi) = \left(1 - \frac{Vi - 5}{5}\right) \times 100\%$$

catatan:

Untuk perhitungan indikator Inflasi Pangan Bergejolak telah disusun dalam manual IKU dengan perhitungan minimize target, dengan batas tertinggi angka inflasi pangan sebesar 5%. Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dengan menggunakan metode minimize target pada triwulan 3-5% capaian triwulan II sebesar 0,57% lebih tinggi dibandingkan periode Triwulan I sebesar 0,37 dari target 3-5%, namun demikian sampai Triwulan II tidak mengalami gejolak harga atau capaian 100%.

3.2.2. SS. Penanganan Kerawanan Pangan Indikator (Penanganan Kerawanan Pangan (Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES))

Indikator FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) tahun 2024 hasil rilis BPS sebesar 4,02% dari target 4,20%. Menunjukkan bahwa kerawanan pangan semakin turun dari tahun ketahun.

Untuk mencapai Indikator FIES tidak bisa dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sendiri melainkan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Peran Badan Pangan Nasional untuk mendukung capaian ini adalah dengan melakukan intervensi program/kegiatan dalam bentuk bantuan pangan yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin.

Inpres 8 Tahun 2025 menetapkan mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui Inpres ini diinstruksikan kepada K/L untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Badan Pangan Nasional ditugaskan untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Pada tahun 2025 Badan Pangan akan menyalurkan bantuan pangan pemerintah bagi 18.300.000 kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 38 provinsi sesuai DTSEN, Bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan 64.800 paket sebelum Inpres 1 tahun 2025, menjadi 15.500 paket, (15.000 KK), intervensi pengendalian kerawanan pangan 36.000 paket (36.800 KK) sebelum Inpres 1 Tahun 2025 menjadi 11.500 paket (11.500 KK), dan 1.944 paket (648 KK) untuk pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Aksi kesiapsiagaan krisis pangan 28.800 sebelum Inpres 1 Tahun 2025 menjadi 4.000 paket (4.000 KK).

Sampai pelaksanaan AKIP periode Triwulan II Tahun 2025 belum ada data di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Capaian Indikator FIES Tahun 2025. Badan Pangan Nasional akan berkontribusi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan untuk intervensi Kerawanan Pangan yang pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang berbagi pakai DT-SEN yang menjadi dasar dalam penentuan penerima manfaat Bantuan Pangan untuk intervensi Kerawanan Pangan.

Capaian indikator ini pengukurannya dilakukan di akhir tahun berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistik.

3.2.3. SS. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Indikator (Skor PPH Konsumsi)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menjadi indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun dan dipublikasikan T+1 dengan menggunakan sumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang akan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret Tahun 2026. Capaian PPH konsumsi tahun 2024 sebesar 93,5 dari target 95,2 atau (98,21%), angka ini masih melebihi target skor PPH yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95%.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat melalui indikator Skor PPH dilakukan melalui implementasi kebijakan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Adapun strategi kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2025 meliputi : (1) promosi pola konsumsi pangan B2SA, (2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA, Desa B2SA DAK Non Fisik, penguatan database konsumsi pangan; penyusunan Petunjuk Teknis; serta koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Dalam mendukung pencapaian skor PPH Badan Pangan Nasional pada triwulan II telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) pada tanggal 25-26 April 2025 di Golden Boutique Hotel Kemayoran

Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Kartini. Kongres ini diikuti oleh gabungan 100 organisasi dengan jumlah peserta sekitar 500 orang. Adapun tema yang diusung yaitu “Peran Perempuan dalam Kepentingan Nasional di Abad ke-21. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 25-26 April 2025 di Golden Boutique Hotel Kemayoran. Tujuan dari diselenggarakannya kongres ini adalah sebagai dukungan terhadap visi misi Presiden dalam mempercepat promosi,

pengembangan dan pemberdayaan perempuan Indonesia sehingga dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa.

2. Promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA tanggal 24 April 2025

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bekerja sama dengan pemerintah daerah terus mengencangkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda melalui program B2SA Goes to School. Salah satu kegiatan dalam rangka program tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 di SDN 14 Tangerang, yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswa-siswi kelas 4 hingga 6 SDN 14 Tangerang beserta para guru. Selain itu Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Dinas Pangan seluruh Indonesia untuk terus melakukan gerakan B2SA agar konsumsi masyarakat beragam.

3. Melaksanakan Kegiatan BGtS di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri, 15 Mei 2025

Sosialisasi B2SA kepada para santri dilakukan dengan edukasi interaktif dengan games sehingga para santri terlibat antusias. Setelah menjelaskan konsep B2SA, santri diminta mencoba menyusun menu B2SA pada isi piringku dengan food model. Dengan praktik langsung, harapannya mereka mengerti dan faham. Selain itu, setelah sosialisasi para santri diberikan konsumsi B2SA sebanyak 1000 box, agar mereka bisa melihat langsung menu B2SA. Pola Konsumsi B2SA harapannya dapat diterapkan oleh Pondok Pesantren dalam Menyusun menu makanan di pondok, dan juga para siswa agar mempraktikkannya ketika makan.

4. Kegiatan B2SA Goes To School di SMAN 5 tanggal 7 Mei 2025

Sosialisasi dilaksanakan di Tambun Selatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh 250 orang yang terdiri dari 200 siswa SMA N 5 Tambun Selatan dan 50 orang guru serta staf sekolah. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Bekasi dan dihadiri juga oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi BGTS SMAN 5 Tambun Selatan menghadirkan 2 narasumber yaitu Ibu Maya Safrina (Badan Pangan Nasional) dan Dr. Rita Ramayulis (Ahli Gizi)

5. Mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat secara aktif untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan Talkshow Konsumsi Pangan Lokal dalam rangka Pencanangan Program SEHAT “Sarapan Endah Hasil Alam Tanah Sunda” Tema : “Arah Kebijakan Pangan Lokal Mendukung Pola Konsumsi Pangan yang Ideal” yang mengusung Tiga gerakan program yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, yaitu SELASA MASASI “Mari Santap Singkong” RABU CIHUI “Cinta Hui” JUMAT SORI TU SAY BU “Sok Ririungan Tuang Sayur Buah” sekaligus Launching Fitur “Piring Berbagi” pada Aplikasi Ngupahan” di Auditorium Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 20 Mei 2025.
6. Penanggap pada forum diskusi Progres Hasil Studi Kebijakan Sistem Pangan Nasional Proyek FOLUR Mendukung RPJMN 2025–2029: Pengembangan Pangan Lokal - tanggal 3 Juni 2025 Badan Pangan Nasional menegaskan komitmennya untuk mendorong peran pangan lokal sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional. Forum diskusi Progres Hasil Studi Kebijakan Sistem Pangan Nasional Proyek FOLUR Mendukung RPJMN 2025–2029: Pengembangan Pangan Lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dihadiri tim studi IPB, BRIN, Kementerian Pertanian, FAO, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan FGD adalah mendapatkan masukan terhadap kajian lokalikasi sistem pangan untuk komoditas Jagung, Ubi Jalar,
7. Bimtek Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan Tahun 2025 tingkat provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia yang diselenggarakan secara daring pada Rabu , 11 Juni 2025.
Bimtek diikuti lebih dari 700 peserta dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia secara daring. Untuk mendorong pencapaian Skor PPH tersebut,

- (1) daerah menyusun target konsumsi pangan berbasis skor PPH dengan mempertimbangkan data baseline terkini dan karakteristik wilayah.
 - (2) Melakukan evaluasi capaian konsumsi pangan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program.
 - (3) Meningkatkan edukasi dan intervensi multisektor khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan keragaman dan kecukupan gizi pangan.
 - (4) Memanfaatkan data terpusat dari BPS secara optimal dan menghindari perbedaan data yang dapat menghambat analisis kebijakan.
8. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA
- Perkembangan realisasi kegiatan Rumah Pangan B2SA sampai dengan 30 Juni 2025 sebanyak 26 desa dari atau 55,3% dari target 47 lokasi/desa. Rumah Pangan B2SA merupakan tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kegiatan Rumah Pangan B2SA meliputi sosialisasi pola konsumsi Pangan B2SA, fasilitasi pengolahan Pangan dan bimtek pengolahan Pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Pelaksana kegiatan Rumah Pangan B2SA adalah Kelompok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa. Kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2025 dilaksanakan di 47 Desa/Kelurahan yang tersebar di 13 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pengembangan Desa B2SA DAK Non Fisik

Pengembangan Desa B2SA merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam satu lokasi desa dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis potensi lokal. Kegiatan ini mencakup pelatihan pengolahan pangan lokal, pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga, bantuan sarana pengolahan pangan, serta pendampingan teknis dari dinas pangan daerah.

Dana DAK Badan Pangan Nasional tahun 2025 ditetapkan pada 809 desa di 50 Kabupaten seluruh Indonesia sebagai sasaran kegiatan Pengembangan Desa

B2SA TA 2025. Lokasi desa B2SA diutamakan pada desa/kelurahan rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 atau 3) serta desa yang memiliki potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Capaian realisasi pelaksanaan dAK B2SA sampai dengan 30 Juni sebesar 22,04% atau **17,833,787,068** dari pagu sebesar Rp.80.900.000.000,- . Kendala yang dihadapi adanya perubahan ketua kelompok, sehingga memakan waktu untuk melakukan revisi.

9. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tindak lanjut Perpres 81/2024 9 Mei 2025

Dalam rangka update nomenklatur Kementerian/Lembaga dan target indikator telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tingkat K/L terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal secara daring pada tanggal 9 Mei 2025. Rakor di hadiri oleh perwakilan K/L yang bertanggung jawab dan pendukung pelaksana strategi nasional dan rencana aksi percepatan penganekaragaman pangan beserta perwakilan dari K/L baru (Kemenco Pangan).

Berdasarkan Rakor tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 dari Kementerian/ Lembaga diharapkan Badan Pangan Nasional dapat melaporkan ke Presiden pada Bulan Agustus 2025 yang bertepatan satu tahun keluarnya Perpres tersebut;
- b. Pembentukan Tim Nasional Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal perlu segera dibentuk dengan anggota yang disesuaikan nomenklatur Kementerian/Lembaga terbaru;
- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penganekaragaman Pangan perlu digabung dengan RAP Pangan dan Gizi, karena di daerah banyak Rencana Aksi Dearah yang perlu disusun;
- d. Dalam mendukung kinerja Tim Monitoring Nasional perlu disusun Petunjuk Teknis Monitoring oleh Badan Pangan Nasional;

- e. Menindaklanjuti dari Rakor ini, ke deputian 3 akan mengirim surat kepada Kementerian/Lembaga untuk meminta laporan terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dalam Perpres tersebut.

Indikator kinerja tujuan ini merupakan cascading langsung dari RPJMN Tahun 2025-2029. Skor PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Capaian skor PPH dihitung pada akhir tahun dan melibatkan lintas sector. Capaian skor PPH tahun 2024 93,5 dari target 95,2 atau 98,21%.

Upaya yang dilakukan untuk Mendorong peningkatan PPH tersebut adalah pelaksanaan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor baik kementerian teknis terkait, perguruan tinggi, swasta/pelaku usaha dan masyarakat umum; serta 3) peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

3.2.4. SS. Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan, Indikator (Indeks Keamanan Pangan Segar)

Indeks Keamanan Pangan Segar adalah indeks yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator yaitu SDM dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen. Pengukuran indikator ini dilakukan pada t+1 dari tahun berjalan dan data pendukung dalam pengukuran indeks ini menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional. Adapun data yang digunakan untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan

kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap system Online Single Submission (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3) indikator perdagangan: jumlah pangan yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat : kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Data yang berasal dari Badan Pangan Nasional merupakan kompilasi data baik di pusat maupun di daerah seperti data hasil pengujian keamanan pangan segar. Dinas yang menangani Pangan Daerah akan meng-input data hasil pengujian ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) setelah memperoleh hasil pengujian keamanan pangan, sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala.

Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025 dilakukan meliputi:

1. Perizinan Produk

Pada Triwulan II Tahun 2025, OKPP-P telah menerbitkan 430 izin edar PSAT-PL dan 26 SPPB-PSAT. Rata-rata waktu penerbitan SPPB-PSAT di pemerintah adalah 25 (dua puluh delapan) hari sedangkan Izin Edar PSAT-PL adalah 16 (enam belas) hari. Perhitungan Persentase Waktu Penerbitan Registrasi dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perhitungan Persentasi Waktu Penerbitan Registrasi

Jenis Perizinan	Standar Pelayanan	Waktu Realisasi Pelayanan	Proporsional	Persentase waktu penerbitan
	(A)	(B)	(C)	$(AB \times 100\% \times C)$
SPPB-PSAT	60	25*	0.2	20,00%
Izin Edar PSAT-PL	14	16	0.8	72,24%
Total Persentase Waktu Penerbitan Registrasi				92,24%

*waktu realisasi penerbitan SPPB-PSAT oleh pemerintah (25 hari) lebih cepat dari waktu standar (60 hari), maka perhitungan persentase waktu penerbitan disesuaikan maksimal 100%

Berdasarkan Tabel 3.4 waktu realisasi pelayanan SPPB-PSAT masih sesuai dengan standar pelayanan, yaitu 25 (dua puluh lima) hari, di mana angka ini masih berada di bawah batas maksimum standar pelayanan yaitu 60 (enam puluh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerbitan SPPB-PSAT masih berjalan secara sesuai dengan target. Sementara itu, waktu realisasi pelayanan izin edar PSAT-PL adalah 16 (enam belas) hari, angka ini melebihi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu 14 (empat belas) hari. Lamanya waktu penerbitan ini diduga disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan Izin Edar PSAT-PL, sehingga pelaku usaha perlu melakukan perbaikan berulang yang berdampak pada lamanya proses penyelesaian.

Adapun persentase waktu penerbitan registrasi mencapai 92,24%, melebihi target tahun 2025 sebesar 78%. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata durasi pelayanan penerbitan SPPB-PSAT dan Izin Edar PSAT-PL yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional telah mendekati standar waktu pelayanan yang ditetapkan.

2. Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman;

Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman melalui kegiatan Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) merupakan kegiatan penguatan sistem manajemen keamanan pangan di pasar rakyat yang bersifat integratif dan sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan konsumen untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan segar yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Pada triwulan II Tahun 2025, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah melakukan publikasi Petunjuk Teknis Pasar Pangan Segar Aman kepada seluruh Pemerintah Daerah Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang merupakan 2 (dua) lokasi penerima pendanaan APBN untuk kegiatan PAS AMAN. Selain itu, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah berkoordinasi dengan kedua lokasi tersebut melalui Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan PAS AMAN TA. 2025 pada tanggal 20 Mei 2025 secara daring sebagai upaya percepatan persiapan implementasi kegiatan. Implementasi kegiatan PAS AMAN

oleh Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan yaitu:

- a. berperan aktif sebagai tim perumus RSNi Pasar Rakyat dalam rapat *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah berlangsung sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan terhitung sejak Maret 2025 hingga Juni 2025. Dalam penyusunan RSNi Pasar Rakyat, Badan Pangan Nasional mengusulkan penambahan narasi terkait keamanan pangan di bagian Pendahuluan, penambahan persyaratan umum dan persyaratan teknis Pasar SNI berupa area pemantauan mutu dan/atau keamanan komoditas pasar rakyat.
- b. melaksanakan Pertemuan Koordinasi/Audiensi Penguatan Penjaminan Keamanan Pangan Segar di Peredaran yang dihadiri oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Deputi PKKP, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag, Direktur PPSKMP, dan fungsional Dit 3.3. Pertemuan audiensi bertujuan untuk mensinkronisasikan upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran dengan kebijakan dan program di Kemendag, terutama terkait usulan Badan Pangan Nasional menambahkan persyaratan umum dan persyaratan teknis Pasar SNI berupa area pemantauan mutu dan/atau keamanan komoditas pasar rakyat pada RSNi Pasar Rakyat, serta dukungan kolaborasi laboratorium terakreditasi Kemendag dalam kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran.

3. Pengawasan dan Pengendalian Produk Keamanan Mutu Pangan; dan

Pengawasan, investigasi dan penindakan keamanan dan mutu pangan telah dilaksanakan dengan target berupa penyusunan satu laporan kegiatan. Target tersebut telah dicapai melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan segar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui kegiatan pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan khususnya produk kurma dan pengawasan rutin keamanan pangan berupa pengambilan contoh cabai.

Pengambilan contoh kurma dilakukan pada Bulan Maret 2025 di pasar tradisional, toko, retail dan pasar modern di wilayah DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang Selatan. Jumlah contoh kurma sebanyak 60 contoh dan diuji keamanan pangan dengan parameter Salmonella, kapang dan khamir di

Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Jakarta. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa seluruh contoh tidak terdeteksi bakteri *Salmonella* dan 92% contoh terdeteksi kapang dan khamir. Cemaran kapang khamir pada kurma dapat mengurangi mutu kurma, yang menyebabkan kurma menjadi tidak layak konsumsi, dan kerusakan produk yang lebih luas. Tumbuhnya kapang khamir pada produk pangan disebabkan oleh kadar air yang tinggi, kelembaban tinggi dan suhu pengeringan atau suhu penyimpanan yang tidak terkontrol.

Pengawasan keamanan pangan segar lain yang dilakukan adalah pengambilan contoh cabai merah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Mei 2025 di Provinsi Jawa Barat (Kab. Sukabumi, Kab. Bandung dan Kab. Tasikmalaya), Jawa Tengah (Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Semarang dan Kab. Boyolali) dan Jawa Timur (Kab. Surabaya, Kab. Tuban. Kab. Malang dan Kab. Lumajang). Secara keseluruhan contoh berjumlah 33 dan dilakukan pengujian screening residu pestisida di laboratorium Balai Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hasil screening tersebut diketahui bahwa 1) Dari 390 bahan aktif uji screening, 10% (39 bahan aktif) terdeteksi; 2) Dari 39 bahan aktif yang terdeteksi, 34 bahan aktif sudah ada batas maksimal sesuai Perbadan 15/2025, dan 5 bahan aktif lainnya menggunakan standar default 0,01 ppm; 3) Dari 33 sampel, bahan aktif yang terdeteksi paling banyak adalah : difenoconazole, chlorpyrifos, cypermethrin, azoxystrobin, imidakloprid dan profenofos; dan 4) Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah contoh yang sama yaitu 12 sampel, namun bahan aktif yang terdeteksi di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, seluruh contoh yang terdeteksi tersebut dilakukan pengujian residu pestisida secara kuantitatif di laboratorium yang sama.

4. Sarana Keamanan dan Mutu Pangan

Mobil laboratorium keamanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan pengujian dan analisis cepat terhadap keamanan pangan yang dalam praktiknya menggunakan *Rapid Test Kit*. Alat ini memungkinkan

pengawasan keamanan pangan terkhusus pangan segar asal tumbuhan secara langsung di lapangan, untuk mendeteksi secara dini potensi bahaya atau ketidaksesuaian dengan standar keamanan pangan.

Untuk itu dalam mendukung sasaran strategis Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan dilaksanakan melalui pengadaan 4 unit mobil laboratorium keamanan pangan tahun 2025. Berdasarkan revisi anggaran DIPA diusulkan 2 mobil laboratorium keamanan pangan sebagai bentuk fasilitasi untuk memperkuat kapasitas pengawasan keamanan pangan.

Realisasi yang telah tercapai hingga Triwulan II yaitu, telah dilaksanakan survei pengadaan mobil ke penyedia di Kota Bekasi dan Kota Bandung. Hasil survei ini akan ditentukan penyedia yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia untuk mobil laboratorium keamanan pangan salah satunya ialah penyedia harus memiliki TKDN serta memiliki alat laboratorium yang lengkap dan terpercaya.

Indikator ini merupakan cascading langsung dari RPJMN (merupakan indikator baru) yang menjadi perjanjian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Pencapaian indikator ini periode t+1 dan tidak bisa dilakukan oleh Badan Pangan sendiri namun melibatkan lintas sector terkait. Pengukuran indeks ini menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pangan Nasional.

3.2.5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi K/L Meso dalam meningkatkan RB seperti penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyusun Manajemen Resiko (MR), SPI, dengan BPKP untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengusulkan Survei Penilaian Integritas (SPI) ke KPK, untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur

upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Melakukan Reformasi Hukum, peningkatan kualitas penyusunan laporan melalui aplikasi, Penyusunan Laporan Keuangan Semester I, Reviu Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2023-2024, Badan Pangan Nasional juga akan melakukan penilaian dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan dilakukan berdasarkan Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik. Nilai RB Tahun 2024 sampai dengan semester I sebesar 66,89 kategori baik dari target 80, sedangkan untuk capaian Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dirilis MenpanRB pada t+1.

Upaya Untuk meningkatkan Nilai RB tahun 2025 yaitu,

1. melakukan evaluasi dari capaian 2024,
2. memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi aspek penilaian RB
3. Melakukan koordinasi dengan instansi Meso.
4. melakukan konsolidasi dengan seluruh unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional dalam pemenuhan dokumen dan capaian target dalam rangka RB.
5. Melakukan koordinasi dengan KemenPanRB dalam rangka meningkatkan capaian RB.
7. Telah menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
8. Penerapan pelaporan secara digitalisasi, Badan Pangan Nasional telah menyusun aplikasi eSAKIP dalam upaya perbaikan secara terus menerus sesuai perkembangan global.

Penilaian RB Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) penilaian yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pangan Nasional, sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 indikator RB masih mempergunakan evaluasi reformasi birokrasi dengan Indikator PMPRB. Secara mandiri Badan Pangan Nasional akan melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.6. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan 30 Juni 2025, sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Realisasai Anggaran Badan Pangan Nasional per 30 Juni 2025

NO	Unit Kerja	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%
I	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2.615.370.649.000	757.234.191.646	28,95
2	Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi	56.837.000.000	1.244.989.671	2,19
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	68.135.379.000	3.922.856.934	23,31
II	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	117.063.827.000	45.994.166.934	39,28
TOTAL		2.857.406.855.000	808.396.205.185	29,90%

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Rp808.396.205.185 atau (29,90%) dari pagu total Rp2.857.406.855.000,-. Terdiri dari anggaran Pusat Rp2.801.268.025.000,- dan Dekonsentrasi Rp56.138.830.000,-. Dari pagu tersebut dengan adanya kebijakan efisiensi sebesar Rp154.184.443.000,- atau (5,40%). Rendahnya realisasi tersebut, karena adanya program bantuan pangan yang belum tersalurkan serta adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan karena adanya revisi DIPA, sebagaimana tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional sampai dengan Juni 2025

DIPA	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
		DIPA	2 Des 2024	329.957.285.000	275.718.455.000	54.238.830.000	-	95.373.792.000	Belum dilengkapi data dukung dan Efisiensi sesuai Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
1	DJA	DIPA	21 Feb 2025	329.957.285.000	275.718.455.000	54.238.830.000	-	160.900.114.000	Pusat dan Daerah: Efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
2	DJA	DIPA	7 Maret 2025	329.957.285.000	273.818.455.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Pusat dan Daerah: Buka Blokir Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta pengalokasian Dukungan Manajemen Daerah di 38 Satker sebesar 1,9 M
3	DJA	DIPA	11 Maret 2025	329.957.285.000	273.818.455.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Pusat: Revisi dari DJA Penyesuaian Halaman IV DIPA
4	DJA	DIPA	25 Maret 2025	366.382.625.000	310.243.795.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Pusat: Tambahan SP SABA 1) Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2023 Rp 25.682.104.000,- dan 2) Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023 Rp10.748.236.000,-
5	Kanwil	DIPA	15 April 2025	366.382.625.000	310.243.795.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Revisi Hal III DIPA
6	DJA	DIPA	28 April 2025	2.857.406.855.000	2.801.268.025.000	56.138.830.000	-	160.900.114.000	Pusat: Tambahan SP SABA 1) Pembayaran Penyaluran SPHP Beras Triwulan IV 2023 Triwulan II 2024 (1.208.548.836 Kg) Rp 2287.506.557.000,- 2) Pembayaran Penyaluran SPHP Jagung November 2023 - April 2024 (267.160.434 Kg) Rp 203.522.673.000,-
7	DJA	DIPA	18 Juni 2025	2.857.406.855.000	2.801.268.025.000	56.138.830.000	6.715.671.000	154.184.443.000	Pusat Buka Blokir Efisiensi Belanja: 1) Kekurangan Belanja Pegawai; 2) Honorarium PPNPN; dan 3) Kebutuhan Reviu Penyaluran CPP
8	Kanwil	DIPA	29 Juni 2025	2.857.406.855.000	2.801.268.025.000	56.138.830.000	-	154.184.443.000	Revisi Pusat Pemutakhiran POK : Bimtek CPPD, LPM dan Penguatan Distribusi dan Logistik Pangan; 2) Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Evaluasi Dampak Bantuan Pangan; 3) Sewa Kendaraan; serta 4) Gerakan Pengembangan Enumerator Panel Harga Pangan

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II capaian IKSS yang bisa dihitung IKSS Inflasi Harga Bergejolak sebesar 0,57% dari target 3-5%.
2. Untuk pencapaian indikator sasaran strategis yang akan dicapai pada akhir tahun, pada periode triwulan II Tahun 2025 sudah melakukan progress sesuai dengan tahapan per indikator, telah mencapai tahap pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Indikator FIES, yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi lintas sector untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti pemberian bantuan, pemberian makan tambahan berbasis bahan local, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menangani kerawanan pangan.
 - a. Indikator Skor PPH Konsumsi, yang telah dilakukan melakukan koordinasi dengan K/L terkait Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya makan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman untuk meningkatkan kualitas hidup sehat, aktif dan produktif. Serta mesosialisasikan Perpres 81 Tahun 2024 tentang Panganekaragaman Pangan.
 - b. Indikator IKP, yang telah dilakukan melaksanakan Pertemuan Koordinasi/Audiensi Penguatan Penjaminan Keamanan Pangan Segar di Peredaran yang dihadiri oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Deputi PKKP, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag, Direktur PPSKMP.
 - c. Indikator Nilai RB, yang telah dilakukan antara lain mealkukan koordinasi dengan K/L meso, meningkatkan kualitas pelaporan dengan kelengkapan dokumen yang berkualitas.

2. Realisasi Anggaran Total Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Rp.808.396.205.185,- (29,90%) dari pagu total Rp2.857.406.855.000,-. Terdiri dari anggaran Pusat Rp2.801.268.025.000,- dan Dekonsentrasi Rp56.138.830.000,-. Dari pagu tersebut dengan adanya kebijakan efisiensi sebesar Rp154.184.443.000,- atau (5,40%), rendahnya realisasi ini karena adanya revisi DIPA atas kebijakan efisiensi anggaran dan adanya anggaran bantuan pangan yang belum tersalurkan.
3. Realisasi Anggaran Satker Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Rp804.724.639.944 atau (28,72%) dari pagu sebesar Rp2.801.268.025.000,-.
4. Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi sampai dengan Triwulan II Rp56.138.830.000,- atau (6,54%) dari pagu sebesar Rp56.138.830.000,-.

B. Tindak Lanjut/Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, Badan Pangan Nasional akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Membuat jadwal dan memetakan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan program dan anggaran pada triwulan selanjutnya.
3. Mendorong untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan dengan alokasi terbesar dari pagu total, dengan upaya yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Sosial, BPS, dalam rangka menyamakan data dan pemutahiran data penerima bantuan pangan dengan mengacu pada DTASEN.
4. Melakukan koordinasi secara intensif ke Kementerian Keuangan dan instansi terkait, agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tanggal 2 Januari Tahun 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)

Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367

Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>;

Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Prasetyo Adi

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga Pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program

125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

125.01.WA. Program Dukungan Manajemen

Total

Anggaran (Rp.)

212.893.458.000

117.063.827.000

329.957.285.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


 Arief Prasetyo Adi

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Revisi Tanggal 25 Maret Tahun 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Prasetyo Adi**
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 25 Maret 2025
Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL
(REVISI-1)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program		Anggaran (Rp.)
125.01.HA.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	249.318.798.000
125.01.WA.	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000
Total		366.382.625.000

Jakarta, 25 Maret 2025
Kepala Badan Pangan Nasional


Arief Prasetyo Adi 



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Prasetyo Adi**

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 April 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL
(REVISI-2)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program

125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

125.01.WA. Program Dukungan Manajemen

Total

Anggaran (Rp.)

2.740.343.028.000

117.063.827.000

2.857.406.855.000

Jakarta, 28 April 2025

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL
(REVISI-2)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program

125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

125.01.WA. Program Dukungan Manajemen

Total

Anggaran (Rp.)

2.740.343.028.000

117.063.827.000

2.857.406.855.000

Jakarta, 28 April 2025

Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

Lampiran 4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
125.01.HA Program Ketewrsediaan , Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas													2.801.268.025.000		56.138.830.000
				6875	Pemantapan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas								2.592.242.359.000		23.128.290.000
SS1. Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	IKSS1. Inflasi Harga Bergejolak (target Tahun 2025 = 3-5%)	SP1. Terpenuhiya ketersediaan pangan	IKSP1. Skor PPH ketersediaan (target Tahun 2025 = skor 97,3)		SK1. Tersedianya ketersediaan dan kebutuhan pangan	IKSK1. Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	113	%	Pusat dan Satker Dekonsen trasi	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	2	1.851.205.000	38	5.010.840.000
									Pusat	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6	3.232.364.000,00	-	-
									Pusat	AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	6	600.000.000,00	-	-
									Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4	5.486.346.000,00	-	-
			IKSP2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan (target Tahun 2025 = 25%)		SK2. Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan	IKSK2. Rasio pemenuhan cadangan pangan terhadap target	50	%	Pusat	PBR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6	4.000.000.000,00	-	-
						IKSK3. Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah	1,5-3	juta ton	Pusat dan Satker Dekonsen trasi	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	1	10.758.150.000	38	5.864.450.000
						IKSK4. Rasio jumlah cadangan pangan yang dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat	50	%	Pusat	AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14	2.000.000.000	-	-
									Pusat dan Satker Dekonsen trasi	QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1	1.000.000.000	33	2.700.000.000
									Pusat	RAG.001	Sarana Logistik Pangan	4	7.000.000.000	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
		SP2. Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	IKSP3. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (target Tahun 2025 = 20-25%)		SK3. Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	IKSK5. Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	20-25	%	Pusat	PBR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	3.180.000.000	-	-
									Pusat	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	Rp2.102.919.000	-	-
									Pusat	AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10	951.500.000	-	-
									Pusat	QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	50	1.000.000.000	-	-
									Pusat	QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	39	2.750.000.000	38	9.553.000.000
									Pusat	QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	1	500.000.000	-	-
									Pusat	BEC.001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	1.477.948.176	2.527.459.570.000	-	-
									Pusat	QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	15.370.305.000	-	-
									Pusat	RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3	3.000.000.000	-	-
				HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi								53.577.000.000		3.260.000.000
SS2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan	IKSS2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES) (target Tahun 2025 = 3,75%)	SP3. Menurunnya daerah rentan rawan pangan	IKSP4. Persentase daerah rentan rawan pangan (target 2025 = 16,7%)		SK4. Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan	IKSK6. Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	100	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1	1.600.000.000	38	1.900.000.000
									Pusat	AEA.001	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1	3.981.760.000	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
									Pusat	AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4	400.000.000	-	-
									Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1	1.000.000.000	-	-
					SK5. Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	IKSK7. Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	100	%	Pusat	QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	64.800	18.400.000.000	-	-
						IKSK8. Persentase penerima bantuan beras fortifikasi bagi masyarakat rawan pangan	0.5-1	%	Pusat	QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	1.944	583.200.000	-	-
					SK6. Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan	IKSK9. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	80	%	Pusat	PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5	4.710.259.000	-	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	AEA.003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1	7.032.040.000	17	1.360.000.000
									Pusat	QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1	7.000.000.000	-	-
									Pusat	QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1	888.143.000	-	-
									Pusat	RAG.001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	10	7.541.598.000	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
		SP4. Meningkatnya Penyelamatan Pangan	IKSP5. Persentase pangan yang terselamatkan (target 2025 = 3,0-5,0%)						Pusat	PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	1	440.000.000		-
				HA.6877	Pemantapan Pengendalian Konsumsi dan Keamanan Pangan								40.284.839.000		27.850.540.000
SS3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS 3. Skor PPH konsumsi (target Tahun 2025 = skor 94)	SP5. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai target yang direkomendasikan	IKSP6. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah (target Tahun 2025 = 1,00%)		SK7. Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	IKSK10. Konsumsi sayur dan buah	245,33	Gr/kap /hari	Pusat	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Konsumsi Pangan	10	7.860.000.000	-	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	1	3.500.000.000	38	6.840.000.000
			IKSP 7. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian (target Tahun 2025 = 5,00%)		SK8. Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	IKSK11. Konsumsi umbi-umbian	53,4	Gr/kap /hari	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi pengendalian pangan	1	684.460.000	100	8.515.540.000
									Pusat	AFA.001	NSPK Pengendalian Konsumsi Pangan	3	600.000.000	-	-
			IKSP 8. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani (target Tahun 2025 = 2,00%)		SK9. Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	IKSK12. Konsumsi Pangan Hewani	129,11	Gr/kap /hari	Pusat	BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi pengendalian pangan	10	2.000.000.000	-	-
									Pusat	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1	1.500.000.000	-	-
SS4. Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	IKSS 4. Indeks keamanan pangan Segar (target Tahun 2025 = 61%)	SP6. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSP9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (target Tahun 2025 = 91%)		SK10. Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	IKSK13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	42,5	%	Pusat	QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	22	1.499.760.000	219	2.128.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
					SK11. Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	IKSK14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	67,1	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	9	1.243.760.000	-	-
									Pusat	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9	4.628.480.000	-	-
									Pusat	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	5	1.000.000.000	-	-
					SK12. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	IKSK15. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%	Pusat	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3	4.860.650.000	-	-
									Pusat	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3	300.000.000	-	-
									Pusat	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4	4.205.000.000	-	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	1	2.998.000.000	38	3.800.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
						IKSK16. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	500	2.500.000.000	1.900	5.400.000.000
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	1	904.729.000	18	1.167.000.000
125.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													115.163.827.000		1.900.000.000
				125.WA	Program Dukungan Manajemen								115.163.827.000		1.900.000.000
SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	IKSS5. Nilai RB (target Tahun 2025 = nilai 81)	SP7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP10. Nilai SAKIP (target Tahun 2025 = nilai 65)		SK13. Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan yang baik	IKSK17. Indeks Perencanaan Pembangunan	83	indeks	Pusat	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12	5.329.682.000	-	-
									Pusat	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	1.000.000.000	-	-
					SK14. Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	IKSK18. Persentase Tersusunnya Kerja Sama Bidang Pangan	100	%	Pusat	AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1	1.224.972.000	-	-
					SK15. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	IKSK19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik (Skala Likert (1-4))	3,62	nilai	Pusat	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	2.599.500.000	-	-
			IKSP11. Opini BPK (target Tahun 2025 = predikat WTP)		SK16. Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik	IKSK20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	90,00	nilai	Pusat	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1.734.000.000	-	-
						IKSK21. Indeks sistem merit	250,00	nilai	Pusat	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	396	1.887.686.000	-	-
						IKSK22. Indeks reformasi hukum	91	nilai	Pusat	EBA.957	Layanan Hukum	1	1.141.900.000	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
									Pusat	PAD.001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	1	440.000.000	-	-
					SK17. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik	IKSK23. IKPA	94,00	nilai	Pusat	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	1.645.500.000	-	-
						IKSK24. Indeks Pengelolaan Aset	2,25	indeks	Pusat	EBB.951	Layanan Sarana Internal	81	2.313.304.000	-	-
						IKSK25. Indeks tata Kelola pengadaan	52,54	nilai	Pusat	EBA.956	Layanan BMN	4	325.011.000	-	-
						IKSK26. Indeks Kepuasan Layanan Keuangan Pengadaan dan Umum (Skala Likert (1-5))	3,40	nilai	Pusat	EBA.962	Layanan Umum	1	8.348.720.000	-	-
									Pusat	EBA.959	Layanan Protokoler	1	792.600.000	-	-
									Pusat	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	79.057.285.000	-	-
					SK18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK27. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00	indeks	Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Pangan	1	3.669.863.000	-	-
						IKSK28. Indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggara n Statistik Sektoral)	3,00	indeks	Pusat	UAB.001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	1	500.000.000	-	-
					SK19. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK29. Tingkat Maturitas SPIP	3	level	Pusat	EBD.965	Layanan Audit Internal	24	3.253.804.000	-	-
										FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			-	1.900.000.000
										PAD.001	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	1	440.000.000	-	-
Jumlah Anggaran (Pusat dan Dekonsentrasi)													2.801.268.025.000		56.138.830.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 DIPA 7			
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Fisik	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
Pagu Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (DIPA Revisi ke 7)												2.857.406.855.000			

Lampiran 5. RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

NO	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							2.738.578.161.000	3.767.430.063	758.548.296.382	1.630.837.692.691	345.424.741.864
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	A. Direktorat Ketersediaan Pangan					16.180.755.000	399.767.965	441.223.298	9.203.858.242	6.135.905.495
		1. Penyusunan proyeksi neraca pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40 rekomendasi kebijakan	6.862.045.000	93.780.260	37.103.500	4.038.696.744	2.692.464.496
		2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah									
		3. Pengendalian Impor dan Ekspor Pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6 kegiatan	3.232.364.000	282.217.042	301.350.484	1.589.277.884	1.059.518.590
4. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha											
		5. Pemantauan ketersediaan pangan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	6 NSPK	600.000.000	-	47.079.183	331.752.490	221.168.327
		6. Penguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan									
		7. Penyusunan neraca bahan makanan									

8. Pemantauan Ketersediaan Pangan 9. Peningkatan pemanfaatan pangan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4 data	5.486.346.000	23.770.663	55.690.131	3.244.131.124	2.162.754.082
B. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					38.407.724.000	1.490.037.254	5.757.023.683	18.696.397.838	12.464.265.225
1. Pemantauan pasokan dan harga pangan 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras 3. Stabilisasi harga pangan ditingkat produsen melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) 4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung 5. Pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen 6. Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah 8. Penerbitan Regulasi HPP dan HAP 7. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha 10. Gerakan Pangan Murah (GPM) 9. Penerbitan regulasi HAP/HET	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 rekomendasi kebijakan	3.180.000.000	263.123.978	156.515.274	1.656.216.449	1.104.144.299
	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 kegiatan	2.102.919.000	249.861.165	63.646.524	1.073.646.787	715.764.524
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10 NSPK	951.500.000	18.500.000	15.000.000	550.800.000	367.200.000
	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 data	15.370.305.000	756.429.294	3.349.633.276	6.758.545.458	4.505.696.972

	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Fasilitasi Distribusi Pangan	50 Kelompok Masyarakat	1.000.000.000	39.386.750	64.650.000	537.577.950	358.385.300
		Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Pelaksanaan GPM	39 Kelompok Masyarakat	12.303.000.000	139.936.067	2.026.292.410	6.082.062.914	4.054.708.609
		Kios Pangan yang dikembangkan	Pengembang an Kios Pangan	1 Kelompok Masyarakat	500.000.000	22.800.000	81.286.199	237.548.281	158.365.520
	Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 unit	3.000.000.000	-	-	1.800.000.000	1.200.000.000
C. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan					2.560.782.170.000	970.882.371	748.194.822.968	1.532.050.110.755	279.566.353.906
1. Analisis kebijakan ekspor dan impor pangan 2. Penguatan cadangan pangan nasional 3. Penguatan logistik nasional dan wilayah (sarana dan prasarana alat pendingin untuk memperpanjang masa simpan dan stok pangan) 4. Penguatan regulasi cadangan pangan pemerintah 5. Pemantauan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah 6. Program bantuan pangan telur dan daging ayam 7. Program bantuan pangan beras	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6 rekomendasi kebijakan	4.000.000.000	-	39.250.173	2.376.449.896	1.584.299.931
	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	39 kegiatan	16.622.600.000	970.882.371	909.900.874	8.845.090.053	5.896.726.702
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14 NSPK	2.000.000.000	-	67.779.580	1.159.332.252	772.888.168
	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	34 data	3.700.000.000	-	39.250.173	2.196.449.896	1.464.299.931

			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana logistik pangan	Fasilitasi Sarana logistik pangan	4 unit	7.000.000.000	-	-	4.200.000.000	2.800.000.000
			Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	A. Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2023 B. Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023 C. SPHP Beras Triwulan IV 2023 - Triwulan II 2024 D. SPHP Jagung November 2023 - April 2024	1477948176 ton	2.527.459.570.000	-	747.138.642.168	1.513.272.788.657	267.048.139.175
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan					27.864.960.000	63.442.360	502.467.023	16.379.430.370	10.919.620.247
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan berupa penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39 rekomendasi kebijakan	3.500.000.000	1.925.500	169.076.852	1.997.398.589	1.331.599.059
		2. Aksi Kesiapsiagaan krisis pangan 3. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan pengendalian kerawanan pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian	1 kegiatan	3.981.760.000	58.335.660	88.290.402	2.301.080.363	1.534.053.575

	4. Penyusunan NSPK pengendalian kerawanan pangan 5. Intervensi pengendalian kerawanan pangan 6. Penyusunan data dan informasi pengendalian kerawanan pangan 7. Penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi			Kerawanan Pangan						
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	400.000.000	-	85.397.255	188.761.647	125.841.098
		Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 data	1.000.000.000	2.971.200	105.891.686	534.682.268	356.454.846
		Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan	1.944 Paket	583.200.000	-	-	349.920.000	233.280.000
			Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	Intervensi pengendalian rawan pangan	64.800 Paket	18.400.000.000	210.000	53.810.828	11.007.587.503	7.338.391.669
		B. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi				28.972.040.000	153.533.680	516.650.508	16.981.113.487	11.320.742.325
		1. Fasilitasi penyusunan sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5 rekomendasi kebijakan	4.710.259.000	56.421.030	91.851.275	2.737.192.017
		2. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	18 kegiatan	8.392.040.000	64.897.370	263.963.644	4.837.907.392
		3. Gerakan Penyelamatan Pangan								
		4. Penguatan regulasi dalam bidang kewaspadaan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1 Data	7.000.000.000	32.215.280	49.201.720	4.151.149.800

				Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	88 data	888.143.000	-	-	532.885.800	355.257.200
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitas sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	10 Unit	7.541.598.000	-	111.633.869	4.457.978.479	2.971.985.652
			Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	1 RPerpres	440.000.000	-	-	264.000.000	176.000.000
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	A. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan					31.500.000.000	235.689.057	1.683.181.178	17.748.677.859	11.832.451.906
		1. Penguatan regulasi bidang penganekaragaman pangan 2. Analisis Situasi Konsumsi Pangan 3. Promosi konsumsi pangan B2SA	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	10 kegiatan	7.860.000.000	88.774.207	657.890.614	4.268.001.107	2.845.334.072
			Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	39 kegiatan	10.340.000.000	100.295.505	158.834.284	6.048.522.127	4.032.348.084
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	3 NSPK	600.000.000	46.619.345	-	332.028.393	221.352.262
			Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 data	1.500.000.000	-	10.122.500	893.926.500	595.951.000
			Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	Rumah Pangan B2SA	101 kelompok	9.200.000.000	-	837.221.920	5.017.666.848	3.345.111.232

	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekekaragaman pangan	Pengembang an Usaha Pangan Lokal	10 UMKM	2.000.000.000	-	19.111.860	1.188.532.884	792.355.256
B. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					10.500.000.000	164.361.115	832.000.577	5.702.182.985	3.801.455.323
1. Penyusunan standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 2. Penilaian dan Pembinaan kelembagaan keamanan dan mutu pangan daerah 3. Kajian dan rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 4. Harmonisasi Standar Internasional/Regional Bidang Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 5. Koordinasi, Advokasi, Sosialisasi dan Coaching Clinic Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar 6. Peningkatan kapasitas pengawas keamanan dan mutu pangan melalui Diklat PPNS, Bimtek dan Pelatihan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	9 rekomendasi kebijakan	1.243.760.000	-	155.057.446	653.221.532	435.481.022
	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9 kegiatan	4.628.480.000	123.034.605	297.041.697	2.525.042.219	1.683.361.479
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	5 NSPK	1.000.000.000	-	34.994.000	579.003.600	386.002.400

	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina	246 Lembaga	3.627.760.000	41.326.510	344.907.434	1.944.915.634	1.296.610.422
C. Direktorat Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					24.370.512.000	289.716.261	620.927.147	14.075.921.155	9.383.947.437
1. Penguatan regulasi pengawasan standar keamanan dan mutu pangan 2. Serifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan 3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3 kegiatan	4.860.650.000	83.987.442	33.372.050	2.845.974.305	1.897.316.203
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3 NSPK	300.000.000	-	36.340.557	158.195.666	105.463.777
	Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2400 Produk	7.900.000.000	50.340.844	236.702.625	4.567.773.919	3.045.182.612
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi sarana keamanan dan mutu pangan	2 Unit	2.440.133.000	-	-	1.464.079.800	976.053.200
	Pengawasan dan	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat	Pengawasan, Investigasi dan	248 laporan	6.798.000.000	142.897.869	314.511.915	3.804.354.130	2.536.236.086

			Pengendalian Produk	Keamanan dan Mutu Pangan	Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan						
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	19 Lembaga	2.071.729.000	12.490.106	-	1.235.543.336	823.695.558
Program Dukungan Manajemen							118.828.694.000	20.285.737.697	25.718.879.237	43.694.446.240	29.129.630.826
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	A. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas					10.054.154.000	620.736.648	1.096.819.603	5.001.958.649	3.334.639.100
	1. Penguatan akuntabilitas kinerja program dan anggaran	Kerja Sama	Kerja Sama Bidang Pangan	Kerja Sama Bidang Pangan	1 dokumen	1.124.972.000	22.622.748	240.218.034	517.278.731	344.852.487	
	2. Penguatan Kerjasama bidang pangan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	6 layanan	2.599.500.000	251.056.035	485.523.176	1.117.752.473	745.168.316	
	3. Pengelolaan kehumasan dan informasi publik	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 dokumen	5.329.682.000	278.221.748	286.093.325	2.859.220.156	1.906.146.771	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 dokumen	1.000.000.000	68.836.117	84.985.068	507.707.289	338.471.526	
		B. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum					96.147.287.000	18.199.017.631	22.626.294.501	33.193.184.921	22.128.789.947
	1. Pengelolaan BMN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN dan Pengadaan	4 layanan	325.011.000	100.588.200	94.924.335	77.699.079	51.799.386	
	2. Penyediaan layanan protokoler		Layanan Protokoler	Layanan Protokoler	1 layanan	792.600.000	146.807.900	137.019.501	305.263.559	203.509.040	
	3. Penyediaan layanan umum		Layanan Umum	Layanan Umum	1 layanan	8.348.720.000	1.354.611.208	1.989.996.609	3.002.467.310	2.001.644.873	
	4. Pengelolaan administrasi perkantoran		Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 layanan	64.100.476.000	13.276.593.795	15.904.161.376	20.951.832.497	13.967.888.332	
	5. Pengelolaan manajemen keuangan			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 layanan	17.688.480.000	3.028.146.628	3.163.332.346	6.898.200.616	4.598.800.410	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	81 unit	1.346.500.000	-	860.657.060	291.505.764	194.337.176	

	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	1.645.500.000	287.619.900	124.057.544	740.293.534	493.529.022
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Operasional Satker Dekonsentrasi	38 dokumen	1.900.000.000	4.650.000	352.145.730	925.922.562	617.281.708
C. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum					5.203.586.000	247.769.093	514.856.885	2.664.576.013	1.776.384.009
1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 2. Pengelolaan organisasi dan tata laksana 3. Penyediaan layanan hukum	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	1 layanan	1.141.900.000	33.586.000	80.950.531	616.418.081	410.945.388
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1.734.000.000	104.645.290	103.132.970	915.733.044	610.488.696
	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	396 orang	1.887.686.000	109.537.803	290.815.884	892.399.388	594.932.925
	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	1 Rperpres	440.000.000	-	39.957.500	240.025.500	160.017.000
D. Pusat Data dan Informasi Pangan					4.169.863.000	488.888.721	838.533.627	1.705.464.391	1.136.976.261
1. Penyediaan layanan data dan informasi pangan melalui penguatan sistem jaringan dan informasi 2. Pengelolaan data dan informasi pangan 3. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Data dan Informasi Pangan	1 layanan	3.669.863.000	452.183.234	779.773.448	1.462.743.791	975.162.527
	Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	1 Sistem Informasi	500.000.000	36.705.487	58.760.179	242.720.600	161.813.734
E. Inspektorat					3.253.804.000	729.325.604	642.374.621	1.129.262.265	752.841.510
1. Pengawasan dan pengendalian	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	24 Laporan	3.253.804.000	729.325.604	642.374.621	1.129.262.265	752.841.510
Total Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025					2.857.406.855.000	24.053.167.760	784.267.175.619	1.674.532.138.931	374.554.372.690

Lampiran 6. Tabel Lembar III DIPA

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
 Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (890590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
 (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	890590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.420.758	7.566.752	12.996.051	45.605.369	10.816.596	2.505.905.871	17.992.908	19.495.893	20.994.458	17.807.836	17.992.396	121.672.336	2.801.268.025
		BELANJA PEGAWAI	1.604.118	3.800.668	7.871.807	3.800.668	3.800.668	7.871.807	6.120.671	6.100.671	6.254.666	6.055.433	5.871.705	4.947.592	64.100.470
		BELANJA BARANG	814.235	3.733.224	5.066.392	41.737.817	6.412.069	2.497.682.008	11.620.902	11.431.857	11.832.906	11.562.223	11.964.722	111.595.558	2.725.453.916
		BELANJA MODAL	2.405	32.860	57.848	66.884	603.858	352.056	251.334	1.964.365	2.906.887	189.980	155.969	5.129.186	11.713.633
		125.01.HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	323.838	1.095.081	1.399.641	37.778.527	1.418.525	2.492.561.113	3.180.009	3.316.278	3.108.128	3.082.812	3.146.278	41.832.129	2.592.242.359
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	323.838	1.089.841	1.378.008	37.751.846	1.390.088	2.492.532.679	3.122.630	3.257.309	3.051.342	3.023.964	3.090.498	41.358.315	2.591.370.359
		53 BELANJA MODAL	0	5.240	21.634	26.681	28.437	28.434	57.379	58.968	56.784	58.848	55.780	473.814	872.000
		125.01.HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	0	0	216.940	653.634	690.521	656.502	2.340.806	1.848.872	5.092.661	1.842.805	2.034.003	38.200.258	53.577.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	215.980	650.682	687.849	654.259	2.281.325	1.800.108	2.311.469	1.789.291	2.008.550	34.509.058	46.908.600
		53 BELANJA MODAL	0	0	960	2.951	2.672	2.243	59.480	48.766	2.781.162	53.514	25.453	3.691.199	6.668.400
		125.01.HA.6877 Pemantapan Pengeneragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	51.117	149.486	468.956	628.019	831.539	867.711	1.340.132	3.050.796	1.421.100	1.582.251	1.380.478	26.748.387	38.519.972
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	51.117	149.209	463.662	623.417	826.881	862.148	1.335.474	1.243.421	1.416.442	1.574.876	1.372.223	26.556.369	36.475.239
		53 BELANJA MODAL	0	277	5.295	4.602	4.657	5.563	4.657	1.807.375	4.657	7.375	8.256	192.019	2.044.733
		125.01.WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.045.803	6.322.182	10.910.513	6.545.189	7.876.011	11.820.545	11.131.962	11.280.948	11.372.570	11.299.768	11.431.637	14.891.562	116.928.694
		51 BELANJA PEGAWAI	1.604.118	3.800.668	7.871.807	3.800.668	3.800.668	7.871.807	6.120.671	6.100.671	6.254.666	6.055.433	5.871.705	4.947.592	64.100.470
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	439.280	2.494.174	3.008.746	2.711.871	3.507.251	3.632.922	4.881.473	5.131.020	5.053.621	5.174.062	5.493.452	9.171.816	50.699.718

